

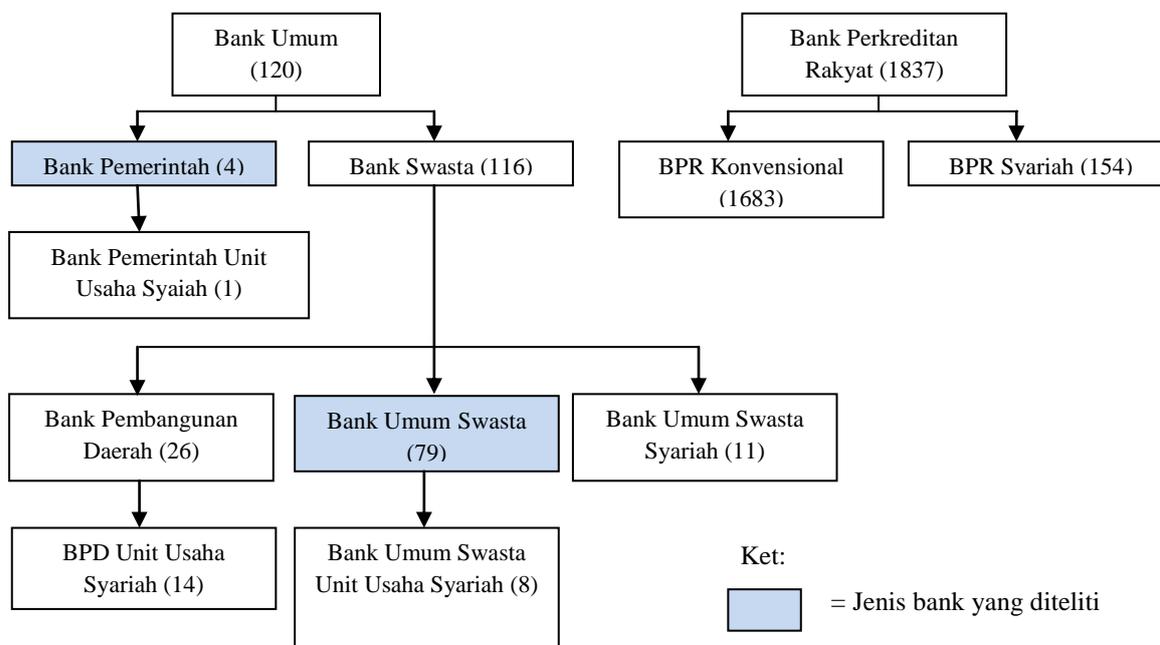
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan bank, baik yang berkaitan dengan kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan UU tentang Perbankan, jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun prinsip syariah yang memberikan jasa dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam kegiatan lalu lintas pembayaran.

Dalam rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia hingga bulan Oktober 2011, jumlah Bank Umum sebanyak 120 bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjumlah 1837 bank. Bank Umum terbagi dalam dua macam yaitu Bank Pemerintah dan Bank Swasta. Sedangkan Bank Swasta terbagi menjadi tiga yaitu Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta (Nasional), dan Bank Umum Swasta Syariah.



Gambar 1.1 Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, Oktober 2011

Sumber: <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>

(Akses: 23 September 2013)

Berdasarkan Gambar 1.1, Bank Pemerintah (Persero) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa menjadi objek yang akan diteliti tingkat kesehatannya. Berikut ini adalah tabel daftar Institusi Bank yang akan diteliti pada penelitian ini:

Tabel 1.1 Daftar Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia yang Terdaftar dalam Papan Utama Bursa Efek Indonesia

No.	Institusi Bank	Kode Emiten	No.	Institusi Bank	Kode Emiten
1.	PT. Bank Bukopin Tbk	BBKP	10.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
2.	PT. Bank Central Asia Tbk	BBCA	11.	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP
3.	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	12.	PT. Bank OCBC NISP Tbk	NISP
4.	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	13.	PT. Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
5.	PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk	BAEK	14.	PT. Bank Permata Tbk	BNLI
6.	PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	BNII	15.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
7.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	16.	PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk	MCOR
8.	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA			
9.	PT. Bank Mega Tbk	MEGA			

Sumber: www.idx.co.id (Akses: 23 September 2013)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut UU No. 10 tahun 1998, definisi bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”. Dalam arti luas, bank merupakan lembaga keuangan sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Peranan lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan masyarakat atau *financial intermediary* (Wardiah, 2013:18).

Pada tahun 1988-1996, industri perbankan di Indonesia mengalami perubahan. Setelah dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang ditujukan untuk “meningkatkan pengerahan dana masyarakat dengan kemudahan dalam mendirikan bank, kebebasan untuk menciptakan berbagai produk perbankan, dan mengizinkan bank-bank asing bergabung dengan bank nasional untuk mendirikan Bank Umum”, menyebabkan industri perbankan mengalami beberapa perubahan. Tabel 1.2 menunjukkan perbedaan kondisi sebelum deregulasi perbankan dan sesudah deregulasi perbankan:

Tabel 1.2 Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Deregulasi Perbankan di Indonesia

Sebelum Deregulasi	Sesudah Deregulasi
<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia (UU No. 13 th. 1968) b. Instrumen pasar uang yang terbatas c. Sulitnya pendirian bank baru d. Persaingan antar bank yang tidak ketat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan yang memberikan kepastian hukum b. Tingkat persaingan bank semakin kuat c. Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat

Sumber : <http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/bank-lembaga-keuangan-1/perkembangan-perbankan-di-indonesia/> (Akses: 24 September 2013)

Pasca deregulasi perbankan, krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 memicu krisis ekonomi dan memberikan dampak bagi struktur ekonomi di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, krisis moneter yang melanda Indonesia pada awal Juli 1997, telah berubah menjadi krisis ekonomi yaitu melumpuhnya kegiatan ekonomi di Indonesia karena banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Terdapat empat sebab utama yang membuat krisis menuju kearah kebangkrutan menurut Bank Dunia (World Bank, 1998, pp. 1.7-1.11, Bank Indonesia). Pertama, akumulasi utang swasta luar negeri yang terus meningkat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini. Kedua, kelemahan pada sistem perbankan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan sistem informasi internal bank dalam memantau, mendeteksi, dan menyelesaikan kredit bermasalah serta tingkat risiko bank yang tinggi. Ketiga, masalah *Governance*, kurangnya kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis yang kemudian menjadi krisis kepercayaan masyarakat sehingga mengakibatkan keengganan investor untuk menawarkan bantuan finansial. Keempat, ketidakpastian politik menghadapi pemilu. Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan kondisi perbankan di Indonesia saat krisis dan pasca krisis ekonomi.

Tabel 1.3 Perbedaan Kondisi Perbankan Saat Krisis dan Pasca Krisis Ekonomi

Kondisi Saat Krisis Ekonomi	Kondisi Pasca Krisis Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun. b. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. c. Kinerja Perbankan yang kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia meningkat. b. Selesaiannya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai pencapaian visi perbankan yang sehat dan efisien.

Sambungan Tabel 1.3

	<p>c. Kinerja Perbankan yang lebih baik, mengarah kepada praktik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik 2. Struktur perbankan nasional yang lebih baik 3. Penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten <p>d. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjamin simpanan 2. Lembaga pengawas perbankan yang independen 3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
--	---

Sumber : <http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/bank-lembaga-keuangan-1/perkembangan-perbankan-di-indonesia/> (Akses: 24 September 2013)

Pada 1 November 1997, dalam pelaksanaan program reformasi di sektor keuangan yang bertujuan untuk menyetatkan sistem perbankan, sebanyak 16 Bank Swasta Nasional ditutup. Penutupan 16 bank tersebut mengakibatkan terjadinya *bank runs* atau peristiwa dimana nasabah sesegera mungkin dan secara bersamaan menarik dana besar-besaran pada suatu bank karena ketidakpercayaan nasabah bahwa bank mampu membayar dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu (Simorangkir, 2011:57). Menurut Simorangkir (2011:53), *Bank runs* dan krisis perbankan yang terjadi berulang kali disebabkan oleh kegiatan bank yang mentransformasikan kewajiban jangka pendek, seperti giro, tabungan, dan deposito ke dalam aktiva jangka panjang seperti kredit. Sehingga aktiva likuid yang dimiliki bank terbatas dan hal tersebut membuat bank rentan terhadap penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran. Desember 1997, satu bulan setelah penutupan 16 bank tersebut, jumlah dana pihak ketiga di bank umum swasta nasional (BUSN) menurun sebesar Rp 22,9 triliun (11,94%). Penarikan dana pada umumnya dimulai sejak penutupan bank dan mencapai puncak penarikan terbesar pada Desember 1997 dan Januari 1998.

Untuk kembali meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, Bank Indonesia melakukan likuidasi dengan menutup 65 bank. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk masing-masing bank (World Bank, 1998, pp. 1.1-1.11, Bank Indonesia).

Peraturan yang jelas tentang perbankan di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pihak bank, hal tersebut membuat semakin tingginya kompetisi pasar antarbank, baik sesama Bank Pemerintah, Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta, maupun Bank Patungan (*Joint Venture*) atau Bank Asing. Tingginya kompetisi pasar antar bank juga berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Untuk terus menjaga

kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga tingkat kesehatannya. Selain itu, persaingan yang semakin kompetitif di industri perbankan juga memicu setiap perusahaan untuk menjadi yang terbaik, salah satunya dengan memperhatikan tingkat kesehatannya.

Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia) dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Wardiah, 2013:238). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dapat diketahui dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui bagaimana kondisi internal bank. Pada setiap perusahaan, bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Napa J. Awat dalam Fahmi (2011:23) bahwa "*Berfungsinya bagian keuangan merupakan prasyarat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bagian-bagian lainnya*". Selanjutnya bank dapat membuat perencanaan aktivitas dan strategi apa yang akan dilakukan dan keputusan apa yang akan diambil untuk periode mendatang.

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia (2012:147), kredit perbankan mempunyai pengaruh sangat besar dalam menjaga tren positif peningkatan laba operasional. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1.2 Komposisi Pendapatan Perbankan

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (2012:147)

Berdasarkan Gambar 1.2, Pendapatan terbesar bank yaitu berasal dari bunga kredit. Artinya adalah kredit merupakan pendapatan terbesar bank di Indonesia yaitu sebesar 51,9% dari total pendapatan Bank Umum diikuti oleh pendapatan operasional nonbunga sebesar 23,3% terutama operasional nonbunga yang berasal dari dividen.

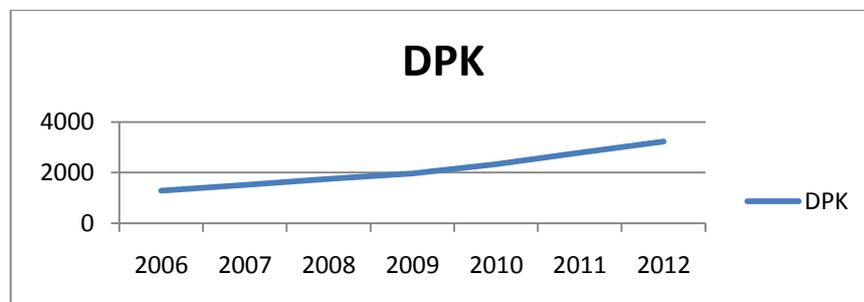
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Tabel 1.4 merupakan data Dana Pihak Ketiga perbankan yang ada di Indonesia pada tahun 2006-2012:

Tabel 1.4 Data Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Indonesia Tahun 2006-2012
(dalam Triliun Rp)

Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bank Pemerintah	480.394	571.008	669.827	783.384	898.405	1.039.257	1.201.284
BUSN Devisa	525.177	606.932	701.71	781.072	975.308	1.174.957	1.353.149
BUSN Non Devisa	24.423	30.491	33.213	43.98	58.95	83.095	104.346
BPD	129.141	134.287	143.262	152.251	183.624	235.265	278.535
Bank Campuran	35.927	54.934	76.902	94.761	98.161	110.865	132.454
Bank Asing	92.04	113.182	128.377	117.594	124.376	141.473	155.43

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa hampir seluruh Dana Pihak Ketiga perbankan di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2012. Pasca krisis global tahun 2008, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Asing menurun karena peraturan mengenai Bank Asing diatur oleh Negara dari masing-masing bank tersebut. Masyarakat kurang percaya dengan peraturan perbankan luar negeri, oleh karena itu DPK Bank Asing menurun pada tahun 2009 akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2010 dan seterusnya. Jika dilihat secara keseluruhan, grafik pertumbuhan total Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Indonesia pada tahun 2006-2012 terdapat dalam Gambar 1.3:



Gambar 1.3 Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga Bank Umum Periode Tahun 2006-2012
(dalam Triliun Rp)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

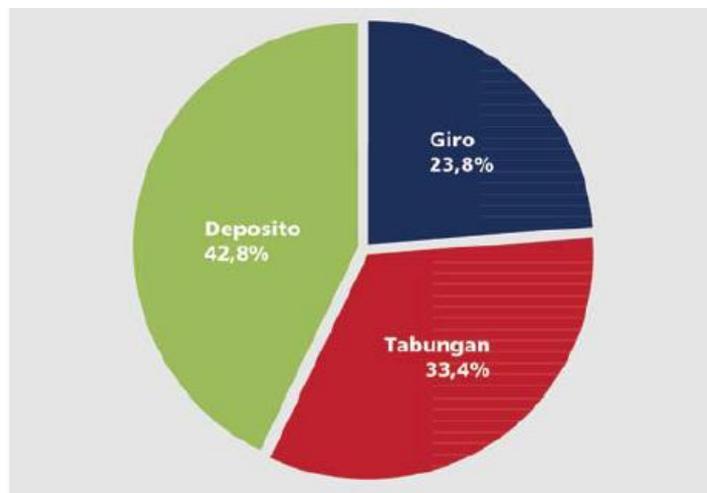
Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum pada tahun 2006 hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 total DPK sebesar Rp 1287,102 triliun, sedangkan pada tahun 2012 meningkat dratis lebih dari 250% menjadi Rp 3225,198 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan grafik perkembangan DPK pemerintah dan swasta dari tahun 2009-2012:



Gambar 1.4 Perkembangan DPK Pemerintah dan Swasta

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (2012:148)

Berdasarkan Gambar 1.4, DPK pemerintah dan DPK swasta dari tahun 2009-2012 cenderung meningkat. Menurut Laporan Perekonomian Indonesia, Kinerja perbankan dapat diukur dari kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat terkait dengan fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berikut ini merupakan struktur DPK Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Swasta (BUK dan BUS):

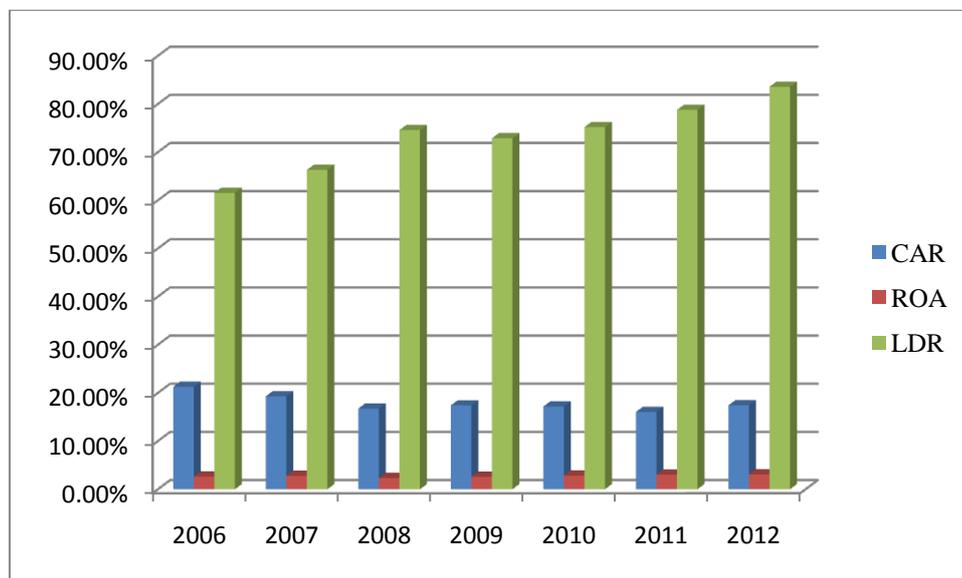


Gambar 1.5 Struktur DPK Tahun 2009-2012

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (2012:149)

Berdasarkan Gambar 1.5 deposito menempati urutan tertinggi yang paling mendominasi dana simpanan masyarakat mencapai Rp 1.381,3 triliun atau 42,8% diikuti oleh tabungan sebesar Rp 1.078,1 triliun atau 33,4% dan giro sebesar Rp 767,1 triliun atau 23,8%.

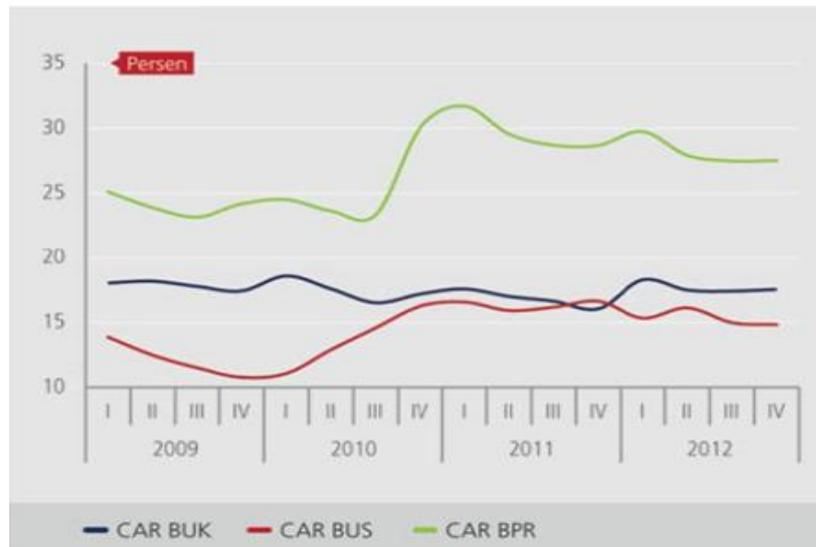
Menurut SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, Rasio LDR merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank). Dana pihak ketiga tersebut dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2011: 137). Menurut Wardiah (2013:246), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Gambar 1.6 merupakan diagram pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Umum di Indonesia pada tahun 2006-2012.



Gambar 1.6 Pertumbuhan CAR, ROA, LDR Bank Umum Periode tahun 2006-2012

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

Ketika krisis global pada tahun 2008, terlihat bahwa CAR dan ROA menurun, diikuti dengan kenaikan kembali pada tahun 2009. Sedangkan LDR pada tahun 2006 hingga 2012 berturut-turut yaitu 61,56%, 66,32%, 74,58%, 72,88%, 75,21%, 78,77%, 83,58%. LDR mengalami penurunan di tahun 2009 ketika pasca krisis global di Indonesia. Berikut ini merupakan grafik perkembangan CAR pada Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Swasta (BUS), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2009-2012:

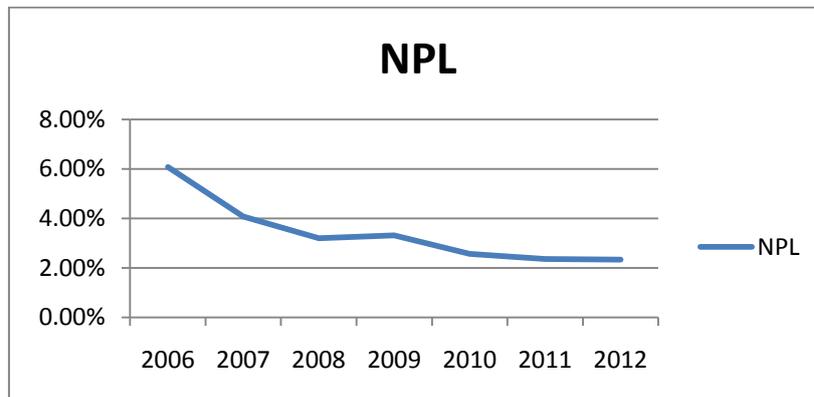


Gambar 1.7 Perkembangan CAR tahun 2009-2012

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (2012:147)

Modal BUK yaitu Rp 500,1 triliun dengan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 17,4%. Sedangkan modal Bank Umum Swasta (BUS) yaitu sebesar Rp 13,9 triliun dengan rata-rata CAR sebesar 14,1% dan untuk BPR tingkat permodalannya yaitu sebesar Rp 9,5 miliar dengan rata-rata CAR 27,6% (LPI, 2012:147).

Non performing loan (NPL) merupakan salah satu rasio untuk mengukur kualitas kredit suatu bank (metadata Bank Indonesia, www.bi.go.id). Gambar 1.8 merupakan pertumbuhan NPL Bank Umum di Indonesia periode 2006 hingga februari 2012.



Gambar 1.8 Pertumbuhan *Non Performing Loan* (NPL) Bank Umum Periode 2006-Feb 2012

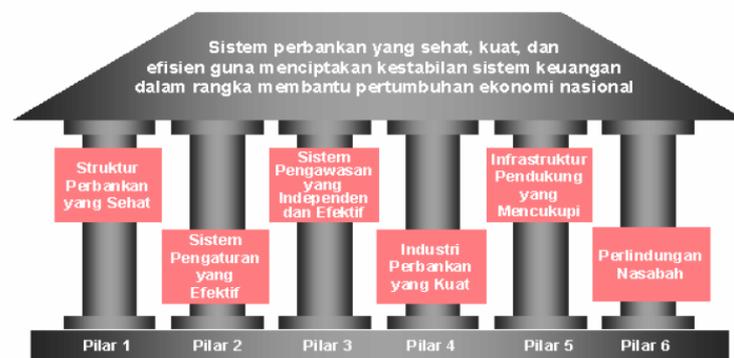
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

Pada Gambar 1.8 terlihat bahwa pertumbuhan NPL tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu 6,07%, kemudian pada tahun 2009 NPL meningkat kembali dari 3,20% (tahun 2008) menjadi 3,31%. NPL yang semakin menurun hingga tahun 2012, menunjukkan bahwa kredit bermasalah semakin rendah, artinya sebagai lembaga *intermediary* bank mempunyai kinerja semakin baik.

Dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan di Indonesia, pada tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menerbitkan peraturan baru yaitu PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu PBI No. 6/10/PBI/2004 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan tersebut berisi bahwa bank wajib menilai tingkat kesehatannya sendiri (*self assessment*) yang berlaku mulai 1 Januari 2012. Peraturan tersebut meliputi faktor *Risk, Governance, Earning, dan Capital* (RGEC) sebagai pengganti *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk* (CAMELS) dalam menilai tingkat kesehatan bank, Permatasari & Nuswantara (2012); Sabir, Ali, Habbe (2012); Utama & Dewi (2012); Sunindyo & Qohhar (2011); Kusumawati (2013). Peraturan Bank Indonesia yang baru menitikberatkan pada RGEC sebagai pengganti penilaian kinerja perusahaan sebelumnya, dimana risiko dan *governance* menjadi salah satu faktor penting karena dibutuhkan manajemen yang baik dalam penanganan risiko untuk mencegah risiko tersebut terjadi (www.bi.go.id).

Bank Indonesia merubah peraturan penilaian tingkat kesehatan dari CAMELS menjadi RGEC disebabkan oleh bisnis yang semakin kompleks dengan banyaknya pengaruh dari faktor eksternal, semakin tingginya risiko perusahaan, serta untuk menerapkan pengawasan konsolidasi seperti pengawasan kepada anak perusahaan. Perubahan peraturan tersebut tidak terlalu signifikan perbedaannya, akan tetapi terdapat elemen baru yang harus dinilai dari masing-masing bank secara detail yaitu profil risiko yang mempunyai delapan macam risiko. Penilaian RGEC sangat menitikberatkan pada profil risiko (*Risk*), seperti faktor *assets quality, liquidity, dan sensitivity to Market Risk* pada CAMELS masuk dalam kategori profil risiko dalam RGEC. Uraian tersebut merupakan alasan penelitian ini menggunakan peraturan baru Bank Indonesia yaitu RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank, Permatasari & Nuswantara (2012); Furqan (2013); Putri & Damayanthi (2013)

Menurut Bank Indonesia, arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang yang dirumuskan dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang dilandasi oleh visi yaitu “*mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional*”.



Gambar 1.9 Enam Pilar Sasaran dalam Pencapaian Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan enam pilar sasaran pencapaian visi API pada Gambar 1.9, terlihat bahwa untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional, salah satu pilarnya yaitu struktur perbankan yang sehat yang tertulis pada pilar pertama serta sistem pengawasan yang independen dan efektif yang tertulis pada pilar ketiga. API yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 ini merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan (www.bi.go.id).

Indikator yang digunakan dalam penelitian Putri dan Damayanthi (2013) yaitu peringkat hasil dari *self assessment* yang telah dilakukan oleh masing-masing bank sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 untuk faktor profil risiko, untuk faktor GCG salah satu indikator yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen, untuk faktor rentabilitas (*earnings*) menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA), dimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia ROA yang memadai yaitu diatas 1,25%, dan untuk faktor permodalan (*Capital*) menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dimana bank wajib memiliki modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko sesuai PBI No. 10/15/PBI/2008.

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) paling tinggi yaitu sebesar 20% dari modal setiap bank. Jika suatu bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, bank yang bersangkutan harus dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, penurunan peringkat faktor manajemen, peningkatan penilaian profil risiko untuk risiko kepatuhan serta pengurus atau pejabat yang bertanggung jawab harus melakukan *fit and proper test*. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDN sangat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank secara langsung. Sangat penting bagi setiap bank untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Booklet Perbankan Indonesia, 2013:139).

Pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta transparansi kondisi bank baik keuangan maupun non keuangan (Booklet Perbankan Indonesia, 2013:174). Utama (2013) mengatakan bahwa penerapan prinsip GCG harus diterapkan dengan baik agar bank memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan yang dapat dijadikan kekuatan untuk melindungi bank dari pengaruh situasi internal dan eksternal perusahaan yang sangat kuat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank antara Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional Devisa menurut peraturan baru Bank Indonesia yaitu menggunakan metode RGEC. Pada penelitian ini faktor *Risk* (Risiko) diukur berdasarkan dua risiko, yaitu risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko pasar yang diukur dengan Posisi Devisa Neto (PDN), faktor *Governance* akan dinilai berdasarkan proporsi jumlah dewan komisaris independen pada masing-masing bank, faktor *Earning* akan diukur dengan *Return on Asset* (ROA), dan faktor *Capital* akan diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Periode yang

diteliti selama lima tahun dari tahun 2008 sampai 2012. Objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Umum yang terdaftar dalam papan utama BEI baik Bank Pemerintah maupun Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Dari penelitian ini kemudian dapat dilihat perbandingan tingkat kesehatan Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional Devisa berdasarkan masing-masing perwakilan dari faktor *Risk*, *Governance*, *Earning*, dan *Capital*. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMERINTAH (PERSERO) DENGAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) DEvisa BERDASARKAN *RISK*, *GOVERNANCE*, *EARNING*, *CAPITAL* (Studi Kasus pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar dalam Papan Utama BEI Periode Tahun 2008-2012)”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Risk* yang diukur dari dua risiko yaitu Risiko Kredit menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) dan Risiko Pasar menggunakan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012?
2. Bagaimana penilaian *Governance* perusahaan yang dilihat dari proporsi jumlah dewan komisaris independen pada masing-masing Bank Pemerintah maupun Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012?
3. Bagaimana perkembangan *Earning* yang diukur dari *Return on Asset* (ROA) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012?
4. Bagaimana perkembangan *Capital* yang diukur dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012?
5. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional Devisa sesuai dengan metode RGEC periode tahun 2008-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan *Risk* yang diukur dari dua risiko yaitu Risiko Kredit menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) dan Risiko Pasar menggunakan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012.
2. Untuk mengetahui penilaian *Governance* perusahaan yang dilihat dari proporsi jumlah dewan komisaris independen pada masing-masing Bank Pemerintah maupun Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012.

3. Untuk mengetahui perkembangan *Earning* yang diukur dari *Return on Asset* (ROA) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012.
4. Untuk Mengetahui perkembangan *Capital* yang diukur dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2008-2012.
5. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional Devisa sesuai dengan metode RGEC periode tahun 2008-2012.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis yaitu:

1. Bagi bidang akademis khususnya bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi dan pengetahuan tambahan mengenai tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan metode baru yaitu RGEC.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan di Indonesia menggunakan metode RGEC.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara praktis agar implementasi pengetahuan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi perusahaan perbankan di Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan saran untuk terus memperbaiki kinerja perusahaan dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor *Risk*, *Governance*, *Earning*, dan *Capital*.
2. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi terutama pada dunia perbankan dengan mengetahui tingkat kesehatannya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab kedua berisi tinjauan pustaka penelitian yang meliputi teori mengenai perbankan, laporan keuangan, dan kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC. Bab ini juga berisi penelitian

terdahulu yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah penelitian serta terdapat kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, gambaran populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi perhitungan *Risk* yang diukur oleh NPL dan PDN, *Governance* yang dinilai dari proporsi jumlah dewan komisaris independen, *Earning* yang diukur dengan ROA, dan *Capital* yang diukur dengan CAR dari Bank Pemerintah maupun Bank Umum Swasta Nasional Devisa, kemudian terdapat perbandingan tingkat kesehatan antara kedua jenis bank tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi kesimpulan hasil analisis serta saran atas penelitian. Dengan keterbatasan penelitian, diharapkan penelitian dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.